DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2018.

al-Zarqa, Musthafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid: Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am,* Juz 1. Damaskus: Dar al-Qalam, 2004.

al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.

al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah,* Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.

Arie Sukanti Hutagalung. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah.* Jakarta: LPHI, 2005.

A.Mdjedi Hasan. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum.* Jakarta: Fikahatu Aneska, 2009.

Badudu, J.S., dan Sutan Takdir Alisjahbana. *Pokok-Pokok Hukum Agraria.* Bandung: Alumni, 2006.

Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A. Chodari. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata.*Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2008.

Cst Kansil, Christine S.T., Engeline R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Gunawan Widjaja. *Hukum Tanah dalam Perspektif Praktisi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Gustav Radbruch. *Filsafat Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

H. Ridwan. *Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah.* Bandung: Refika Aditama, 2017.

Iman Sudiyat. *Hukum Adat: Sketsa Asas.* Yogyakarta: Liberty, 2010.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Hak-Hak Atas Tanah.* Jakarta: Kencana, 2008.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, ATR/BPN, Jakarta, 2019.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Pedoman Pengelolaan Warkah Pertanahan*, Jakarta, 2019.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Pedoman Teknis Pendaftaran Tanah.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendaftaran Tanah, 2020.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Pedoman Pelaksanaan Sertipikat Tanah Elektronik.* Jakarta: Dirjen Infrastruktur dan Teknologi, 2021.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Tahunan Penanganan Sengketa Pertanahan,* Jakarta, 2022.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Laporan Implementasi Sertipikat Elektronik Tahun 2024–2025*, Jakarta: Direktorat Jenderal Infrastruktur Pertanahan, 2025.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Agraria dan Penataan Ruang di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Kepastian Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Maria S.W. Sumardjono. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 2022.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktik.* Bandung: Mandar Maju, 2013.

Rusmadi Murad. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan.* Bandung: Mandar Maju, 2018.

Samun Ismaya. *Hukum Administrasi Pertanahan.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sri Mamudji. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2021.

Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2017.

Urip Santoso. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif.* Jakarta: Kencana, 2020.

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.* Jakarta: Kencana, 2020.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Badan Strategi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang, *Laporan Evaluasi Implementasi Sertipikat Elektronik di Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2024.

Budiarto, R. "Peran Pembinaan Internal dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Manajemen Pemerintahan Daerah*, Vol. 6, No. 1 (2021): 45–57.

Dini Ernawati, Asri Wijayanti, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Sertipikat Tanah Elektronik." *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9 (2024): 5258–5266.

Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Teknologi Pertanahan, *Laporan Nasional Implementasi Sertipikat Elektronik Semester I Tahun 2024*, Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2024.

Fatimah, S., Zen, N. H., & Fitrisia, A., "Literatur Review dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Khusus," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Surat Edaran Direktur Jenderal Infrastruktur dan Teknologi Pertanahan Nomor 2/SE-400.2/II/2024 tentang Pedoman Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Daerah.

Surat Edaran Kementerian ATR/BPN Nomor 3/SE-400.HK.02/IV/2024 tentang *Peningkatan Kapasitas SDM Pertanahan dalam Pengelolaan Sertipikat Elektronik.*

Habibi Yunus. "Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2 (2021): 318–325.

Lestari, Rina. "Integrasi Sistem Pertanahan Digital dengan Perbankan dan Notariat." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1 (2023): 88.

M. Syafrinaldi. "Transformasi Digital Pertanahan Melalui Sertipikat Elektronik di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 1 (2023): 45.

Riawan Tjandra. *Hukum Siber Indonesia: Aspek Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Dunia Digital.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Ridwan Khairandy. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 1 (2021): 104.

Sy. Arifin Habibi, Ghally Sukma Prambudi, Tuti Trisnawati, & Ratna Wulandari. "Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi dan Tantangan Sertipikat Elektronik di Indonesia." *Jurnal RIO*, Vol. 4, No. 1 (2024): 22–35.

Yuliana Sari. "Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2 (2021): 345.

SKRIPSI

Andi Adinda Asty Maharaja. "Kedudukan Hukum Sertifikat Elektronik Hak Milik Atas Tanah." Universitas Bosowa, Makassar, 2023.

Atfi Faramadina. "Kesiapan Menuju Pendaftaran Tanah Berbasis Elektronik di Indonesia." Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2023.

Fadel Dwi Baskara. "Kajian Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia." Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

Misbahul Munir. "Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Rizqia Salsa Bila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keamanan Sertifikat Tanah Elektronik Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik." Universitas Nusa Putra, Sukabumi, 2022.

Thalia Jesia Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (E-Certificate)." Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

INTERNET

Fitria Dewi Navisa. "Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi." 2020. http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle, diakses pada 4 April 2025

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Dede Rismanto**,** Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Kabupaten Magelang, 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Endang Untari, selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Magelang, 18 November 2025

Wawancara dengan Bapak Muhammad Nizam Fanani, selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta tanah di Kabupaten Magelang, 18 November 2025

Wawancara dengan Bapak U'ud Darul Huda, Notaris PPAT Kabupaten Magelang, 28 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Isabela**,** Masyarakat Kabupaten Magelang, 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Susi Indriyanti selaku Masyarakat Kabupaten Magelang, 18 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Viki Mayasari selaku Masyarakat Kabupaten Magelang, 18 November 2025.